BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan oprasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4.1.1 Sejarah KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Kota Bandung. Maka pada sub bab ini akan menjelaskan sejarah pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

1. Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang ditetapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada

Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan " *Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian",* yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inpeks Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Cooperative,* yaitu kelompok anti republic yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non-Cooperative,* yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh mentri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian mentri Negara ini menunjukan Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980. Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keutusan mentri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni:

1. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/01/1988, struktur organisasi dan tata

kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan peneriamaan dari sector pajak. Perkembangan terakhir ada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No. 114.
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372.
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No. 2116.
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No. 574.
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21.
6. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 78.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara

Instansi pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintah Belanda.Pada waktu itu peraturan-peraturannya masih menggunakan peraturan Belanda.Instansi pajak di Indonesia mula-mula bernama "*De Inspective Finantien"*, yaitu badan yang mengurus soal-soal pemasukan pungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Suatu jawatan Jepang yang mengurus soal-soal keungan pada masa pemerintahan Indonesia "*Zaimuba"* pada tanggal 17 Agustus 1945 diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak.Pada waktu itu agresi militer I tanggal 12 Juli 1947, Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Concordia tepatnya di Gedung Merdeka dipindahkan ke daerah Bandung Selatan. Perpindahan ini dikarenakan adanya suatu

demarkasi dalam peperangan, pada waktu pihak Belanda menguasai daerah sebelah selatan garis batas jalan rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur.

Pada waktu itu Belanda mengusai kantor keuangan yang kedua-duanya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Immanuel, kemudian waktu pasukan Indonesia mundur ke sebelah selatan lagi maka personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan lagi ke tasikmalaya dengan personil yang masing-masing berbeda pendapatnya yaitu:

1. Kelompok *Cooperative,* yaitu kelompok yang mau bekerjasama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya tetapi tetap berkedudukan di Bandung.
2. Kelompok *Non-Cooperative,* yaitu kelompok personil yang ikut ke Tasikmalaya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Mentri Keuangan diganti menjadi Inspeksi pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 141/KMK01/1979 tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 94/KMK01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak

yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonegara di Jalan Cipaganti No. 155-157 Bandung.
5. KPP Cimahi di Cimahi

Selanjutnya pada akhir tahun 2007, sehubungan dengan adanya peleburan KP. PBB, KARIKPA, dan KPP menjadi KPP Pratama dan KPP Madya maka KPP Bandung Bojonegara dirubah menjadi KPP Pratama bandung Bojonegara sebagai KPP hasil peleburan bagian KP. PBB Bandung Satu, Karikpa dan KPP Bandung Bojonegara.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega

Perkembangan pajak di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pada waktu sudah ada pemungutan pajak yang dikenal dengan nama*Oorlogs Avergangs Blastik* yang berarti “pajak peralihan”. Seperti layaknya pemungutan pajak seperti saat ini, pemungutan pajak jaman dulu dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu.Pemungutan ini dilaksanakan oleh badan yang bernama

Inspectie Vinantie, yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengawasi masalah pemungutan pajak yang dilakukan secara paksa pada rakyat.

Keluar dari masa penjajahan Belanda, Indonesia masuk dalam masa penjajahan Jepang.Pada masa pemerintahan Jepang.Istilah *Oorlogs Avergangs Blastik* diganti dengan *Zaimuba*, yang diberi tugas untuk mengurus masalah keuangan Jepang di Indonesia.Lepas dari tangan penjajahan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan baru Indonesia mengganti istilah Zaimuba dengan "inspeksi Keuangan". Badan ini bertempat *Concordia* (Gedung Merdeka) Bandung yang terletak di jalan Raya Barat atau untuk sekarang lebih dikenal dengan nama Asia Afrika. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra tingkat II Praja, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Agustus 1947, Kantor Inspeksi Keuangan dipindah ke Kabupaten Soreang dengan alas an agar tidak terganggu. Namun pemindahan ini tidak menjadi solusi yang baik, perang tidak terhindarkan, tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana ibu kota Negara Republik Indonesia yang saat itu terletak di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk mengantisipasi hal yang sama, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan lagi, kali ini ke Tasikmalaya.

Setelah Indonesia diakui kedaulatannya, Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan di Bandung, dan seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya penduduk serta

berkembangnya tingkat ekonomi rakyat, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Daerah wewenang nya sendiri meliputi daerah swatantra tingkat II Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, sedangkan untuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi:

1. Inspeksi Pajaka Bandung, meliputi Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Banjar dan Ciamis yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Melalui Surat Keputusan Menkeu RI No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia berubah namanya menjadi "Kantor Pelayanan Pajak". Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 561/KMK.01/1992, organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang ada menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung sendiri menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Jalan Raya Cimahi.

Untuk meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan fisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, diberlakukanlah Surat Keputusan Menkeu RI No. 756/KMK.01/1993, yang disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Menkeu RI No. 94/KMK.01/1994, tanggal 29 Maret 1994, serta penyesuaian dengan wilayah Pemerintahan Tingkat II Kotamadya Bandung, maka Kantor Pelayanan Pajak Kotamadya Bandung dipecah lagi menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonegara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 443/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Februari 2002, Kantor Pelayanan Pajak Bandung dibagi menjadi 6 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonegara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.
6. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP.112/PJ/2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai

beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan pajak di Bandung dibagi menjadi:

1 KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2 KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3 KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4 KPP Bandung Bojonegara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5 KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Adanya wilayah kerja untuk kantor Pelayanan Pajak Tegallega Bandung meliputi:

1. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Kecamatan Astana Anyar.
3. Kecamatan Babakan Ciparay
4. Kecamatan Bojong Kaler.
5. Kecamatan Bojongloa Timur.

4.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

Pada Masa Penjajahan Belanda, sebenarnya telah dikenal adanya pemungutan pajak, yang waktu itu dikenal dengan nama *Oorlogs Overgangs Belasting,* yang berarti pajak peralihan, pajak ini dilakukan oleh suatu badan yang bernama *Inspectie Pinantie* yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia, maka pada tanggal 9 Maret 1942 *De Inspectie Penantie* diganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu jawaban buatan Jepang yang mengurus soal keuangan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu setelah diproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka *Zaimuba* diganti menjadi Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di *Corcodiai* (Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swantara tingkat II kota praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Bogor.

Tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Bandung pindah ke Kabupaten Soreang dengan alas an agar keamanan tidak terganggu, tetapi akibat revolusi fisik yang berkepanjangan maka peperangan tidak dihindarkan pada saat terjadi agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 desember 1948, Ibu kota saat itu berada di Yogyakarta direbut Belanda. Untuk menghindar serangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan republic Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok yang bekerjasama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya kelompok ini menganut system *Cooperative*, yaitu Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung.

2. Kelompok yang menganut *Non-Cooperative,* yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh mentri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian mentroi Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Insoeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*) di Jalan Raya Barat, saat ini Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Begitu Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung, dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantara tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung serta Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Sumedang yang berkedudukan di Karawang.

Maka pada tahun 1967 kembali dipecah menjadi:

1. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: Kota Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan perkembangannya penduduk dan pembangunan diberbagai bidang khususnya di Kota Bandung, maka Inspeksi Pajak ini dipecah kembali menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur meliputi: Kotamadya Bandung sebelah timur yang berbatasan dengan Jalan Mochamad Toha, Jalan Otoiskandardinata, Cicendo, Cihampelas bagian selatan, Pasteur bagian timur, Jalan Setiabudi yang berkantor di Asia Afrika No. 144 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi: Kota Praja Bandung dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1989 Nomor Kep-276/KMK/1989, terhitung tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri terdapat 4 KPP yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiaracondong No. 327 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Bandung Barat yang beralamatdi Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat No. 1 Cimahi.

Pada tanggal 20 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor 94/KMK/01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP yang ada di Bandung dipecah menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi meliputi: Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jalan Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega meliputi: daerah pemerintah (Daerah Kawedanan Tegallega) yang berkantor di Jalan Soekarno – Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi: daerah pemerintah Cibeunying yang berkantor di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees meliputi: daerah pemerintahan karees yang berkantor di Jalan Kiaracondong 372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara meliputi: Daerah Bojonegara yang berkantor sementara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja wilayah Direktorat Jendral Pajak tanggal 23 Juli 2001 terhitung tanggal 1 Februari 2002 Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi:

1. Kecamatan Lengkong
2. Kecamatan Regol
3. Kecamatan Batununggal
4. Kecamatan Margacinta
5. Kecamatan Rancasari

6. Kecamatan Bandung Kidul
7. Kecamatan Sumedang

5.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayah nya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan pajak Bandung Cibeunying sebagai Kantor Pelayanan Pajak lama meliputi wilayah Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat Mulai beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Prtama dan kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak banten, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicada mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cibiru
4. Kecamatan Ujungberung
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Margacinta

Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak di bidang Pelayanan Pajak. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Secara organisator, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi *Account Representative,* Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan Staf Pelaksana.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ?2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Banten, Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Deskripsi Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu badan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.

2. Sub Bagian Umum

   Sub Bagian Umum memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

Seksi Ekstentifikasi Perpajakan mempunyai fungsi dan tugas melaksankan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulakn dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayana dukungan teknus computer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling,* serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, membrikan penyuluhan pajak, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerja sama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak konsulatsi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsilisasi data wajib pajak dalam rangka intentifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstentifikasi.

4.1.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung adalah instansi vertical Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas nya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendekatan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 75 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	**59**	**78,66 %**
Wanita	**16**	**21,33 %**
Jumlah	**75**	**100 %**

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 78,66%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 21,33% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.Hal ini disebabkan karena pria sebagai kepala rumah tangga dan istrinya tidak ikut bekerja.Maka rata-rata pegawai di KPP mayoritas laki-laki.

b. **Profil Responden Berdasarkan Usia**

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-25 Tahun	**6**	**8 %**
26-30 Tahun	**10**	**13,33 %**
31-35 Tahun	**26**	**34,67 %**
36-40 Tahun	**21**	**28 %**
> 40 Tahun	**12**	**16 %**
Jumlah	**75**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 8% , 26-30 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 13,33%, 31-35 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 34,67%, 36-40 tahun sebanyak 21 orang sebesar 28%, Diatas 40 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 16%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung lebih banyak yang berusia 31-35 tahun.Hal ini disebabkan karena lebih memiliki pengalaman yang cukup di dalam pemeriksaan pajak.

c. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
Diploma III (D3)	**14**	**18,67 %**
Strata I (S1)	**43**	**57,33 %**
Strata II (S2)	**18**	**24 %**
Jumlah	**75**	**100 %**

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 43 orang atau sebesar 57,33%, Diploma III sebanyak 14 orang atau 18,67% dan Strata II (S2) sebanyak 18 orang atau sebesar 24%. Kuesioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak lebih banyak berpendidikan Strata I (S1) dari pada Strata II (S2). Hal ini disebabkan karena S1 sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai pemeriksa pajak.

4.3 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskriftif akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase skor tanggapan responden. Penentuan persentase skor tanggapan responden didasarkan pasa skor minimum dan skor maksimum, dimana rentang persentase skor minimum dengan persentase skor maksimum akan dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan jumlah pilihan jawaban pada kuesioner penelitian.

Kemudian persentase skor tanggapan responden tersebut dikonsultasikan terhadap tabel pengklasifikasian. Kriteria yang digunakan dalam penilaian persentase skor tanggapan responden yaitu: Sangat baik/sangat tinggi, Baik/tinggi, Cukup

baik/sedang, Kurang baik/rendah dan Tidak baik/sangat rendah yang disusun berdasarkan rentang skor pada tabel 3.7.

4.3.1 Hasil Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan, selanjutnya untuk memperoleh gambaran pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi persentase skor tanggapan responden atas ke 19 indikator. Berikut hasil rekapitulasi persentase skor tanggapan responden mengenai partsipasi dalam penganggaran:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Tanggapan responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data	366	375	97.6	Sangat Baik
2	Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak	358	375	95.4	Sangat Baik
3	Mengidentifikasi Masalah	349	375	93	Sangat Baik
4	Pengenalan lokasi wajib pajak	339	375	90.4	Sangat Baik
5	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	332	375	88.5	Sangat Baik
6	Menyusun program pemeriksaan	298	375	79.4	Baik
7	Menentukan buku-buku dokumen yang akan dipelajari	344	375	91.7	Sangat Baik
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	313	375	83.4	Baik
9	Melaksanakan penilain atas sistem pengendalian intern	308	375	82.1	Baik
10	Memeriksa di tempat wajib pajak	316	375	84.2	Sangat Baik
11	Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	299	375	79.7	Baik
12	Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen	219	375	58.4	Cukup
13	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	352	375	93.8	Sangat Baik

14	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak	347	375	92.5	Sangat Baik
15	Melakukan sidang penutup	352	375	93.8	Sangat Baik
16	Umum	342	375	91.2	Sangat Baik
17	Pelaksanaan pemeriksaan	344	375	91.7	Sangat Baik
18	Hasil Pemeriksaan	342	375	91.2	Sangat Baik
19	Kesimpulan dan Usulan pemeriksaan	355	375	94.6	Sangat Baik
Total		**6275**	**7125**	**88.1**	**Sangat Baik**

Sumber: Data Primer yang diolah, 2011

Persentase total akumulasi skor tanggapan responden sebesar 88,1% termasuk dalam kategori sangat baik, artinya sebagian pemeriksaan pajak di KPP Pratama di wilayah kota Bandung memiliki partisipasi yang sangat besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Namun dalam memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaannya persentase skor aktual nya sebesar 58.4% yang artinya memiliki kategori cukup

Pertisipasi aparat pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dalam pemeriksaan pajak akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan – pernyataan yang diajukan pada kuesioner.Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 19 (Sembilan belas)indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 19 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan:

1. Mempelajari Berkas Wajib Pajak yang akan dipelajari

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mempelajari Berkas Wajib Pajak yang akan dipelajari

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
1	Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data	F	0	0	0	9	66	366	375	97.6
		%	0	0	0	12	88			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 97.6%, bila merujuk pada tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden dalam hal memeriksa berkas/data wajib pajak yang diperiksa pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung pada umumnya data wajib pajak yang akan diperiksa di cross check data dengan data intern yaitu sebesar 88%. Sedangkan yang di check kebenaran data yang akan diperiksa yaitu sebesar 12%.

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
2	Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak	F	0	0	1	15	59	358	375	95.46
		%	0	0	1.33	20	92			

Sumber: Data primer yang diolah,2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 95.46%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden sebesar 92% yang menanggapi bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan dan pembukuannya, responden sebesar 20% juga berpendapat Wajib Pajak sudah hampir mendekati dengan ketentuan pengisian SPT dan 1.33% responden berpendapat hanya sebagian saja Wajib Pajak yang sesuai mengisi SPT dengan ketentuan perpajakannya.

3. Mengidentifikasi Masalah

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mengidentifikasi Masalah

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
3	Mengidentifikasi masalah	F	0	0	0	26	49	349	375	93
		%	0	0	0	34.6	65.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Mengidentifikasi Wajib Pajak, baik Nama Wajib Pajak, NPWP, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, dll sangat penting dilakukan. Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam mengidentifikasi masalah.Persentase skor tanggapan responden sebesar 93% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam sangat baik.

4. Pengenalan Lokasi wajib Pajak

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
4	Melakukan pengenalan lokasi	F	0	0	0	36	39	339	375	90.4
	wajib pajak	%	0	0	0	48	52			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 90.4%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden sebesar 52% mengenai pentingnya melakukan pengenalan lokasi wajib pajak menunjukkan bahwa dalam tahap persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan harus terlebih dahulu melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang akan diperiksa agar hal tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan fokus dan untuk memastikan keberadaan usaha wajib pajak, jenis usaha, serta kelancaran usaha Wajib Pajak.

5. Menentukan Ruang lingkup pemeriksaan

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
5	Menentukan ruang lingkup	F	0	0	5	33	37	332	375	88.5
	Pemeriksaan	%	0	0						

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 88.5%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan

responden mengenai menentukan ruang lingkup pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penting dilakukan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yaitu sebesar 37%, kemudian 33% responden berpendapat sangat penting dilakukan, dan 5% responden berpendapat bahwa cukup diketahui dalam mempelajari cakupan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Artinya bahwa mempelajari cakupan pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan penting dilakukan karena dengan menentukan ruang lingkup pemeriksaan akan diketahui penyebab yang paling mungkin atas terjadi masalah-masalah yang terjadi pada Wajib Pajak serta dapat menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

6. Menyusun Program Pemeriksaan

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Mengenai Menyusun Program Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
6	Menyusun program pemeriksaan	F	5	3	6	36	25	298	375	79.46
		%	6.6	4	8	48	33.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 79.46%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa menyusun program pemeriksaan

7. Menentukan Buku-buku Dokumen yang akan Dipelajari

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menentukan Buku-buku Dokumen yang akan Dipelajari

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
7	Menentukan buku-buku dokumen yang akan dipelajari	F	1	4	3	9	58	344	375	91.7
		%	1.3	5.3	4	12	77.3			

Sumber: Data Primer yang diolah 2011

Paling banyak responden sangat setuju dalam menentukan buku-buku dokumen yang akan dipelajari. Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan buku-buku dokumen yang akan dipelajari. Persentase skor tanggapan responden sebesar 91.7% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam sangat baik.

8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyediakan Sarana Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	F	2	3	2	41	27	313	375	83.4
		%	2.6	4	2.6	54.6	36			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 83.4%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai manfaat menyediakan sarana pemeriksaan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dapat memperlancar, mempermudah dan mempercepat

pemeriksaan yaitu sebesar 54.5%, kemudian 36% responden berpendapat dapat mempermudah pemeriksaan.

9.**Memeriksa di Tempat Wajib pajak**

4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
9	Memeriksa di tempat wajib pajak	F	0	2	5	43	25	316	375	84.2
		%	0	2.6	6.6	57.3	33.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setuju jika pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam memeriksa di tempat wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 84.2% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

10. Melaksanakan Penilaian atas system Pengendalian Intern

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Melaksanakan Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
10	Melaksanakan penilaian atas sistem Pengendalian intern	F	1	0	19	25	30	308	375	82.1
		%	1.3	0	25.3	33.3	40			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 82.1%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa apabila perusahaan Wajib Pajak tidak memiliki sistem pengendalian intern, informasi yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipercaya dan tidak reliable. Responden menanggapi jawaban tersebut yaitu sebesar 40%, kemudian 33.3% responden berpendapat informasi dalam perusahaan tidak dapat diandalkan, dan 25.3% responden berpendapat informasi tersebut tidak bias dipercaya begitu saja. Dalam melakukan penilaian atas system pengendalian intern dapat mengetahui kuat/lemahnya Sistem Pengendalian Intern, yang dapat bermanfaat sebagai bahan pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

11. Memutakhirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memutakhirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
11	Memutakhirkan ruang lingkup	F	1	2	16	32	24	299	375	79.7
	Dan program pemeriksaan	%	1.3	2.6	21.3	42.6	32			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden setuju memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam melakukan

pemeriksaan.Persentase skor tanggapan responden sebesar 79.7% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori baik.

12. Melakukan Pemeriksaan atas Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-Dokumen

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Melakukan Pemeriksaan atas Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
12	Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen	F	3	1	13	10	27	219	375	58.4
		%	4	1.3	17.3	13.3	36			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang rendah dalam memutakhirkan tuang lingkup dan program pemeriksaan.Persentase skor tanggapan responden sebesar 58.4% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori cukup.

13. Melakukan Konfirmasi kepada Pihak Ketiga

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
13	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	F	1	2	0	13	59	352	375	93.8
		%	1.3	2.6	0	17.3	78.8			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.Persentase skor tanggapan responden sebesar 93.8% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori baik.

14. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Tabel 4.18
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
14	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak	F	3	1	1	16	55	347	375	92.5
		%	4	1.3	1.3	21.3	73.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 92.5% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

15. Melakukan Sidang Penutup

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Melakukan Sidang Penutup

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
15	Melakukan sidang penutup	F	2	0	0	15	58	352	375	93.8
		%	2.6	0	0	20	77.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam memberitahukan hasil melakukan sidang penutup.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 93.8.5% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

16. Umum

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Umum

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor	Skor	Persentase
			1	2	3	4	5	Aktual	Ideal	%
16	Umum	F	1	1	2	22	49	342	375	91.2
		%	1.3	1.3	2.6	29.3	65.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat menyetujuidalam Laporan pemeriksaan pajak tidak harus memuat keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan,gambaran kegiatan Wajib Pajak,penugasan dan alasan

pemeriksaan,data yang tersedia dan daftar lampiran.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 91.2% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik

17. Pelaksanaan pemeriksaan

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
17	Pelaksanaan pemeriksaan	F	1	3	1	16	54	344	375	91.7
		%	1.3	4	1.3	21.3	72			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam pelaksanaan pemeriksaan dalam LPP memuat penjelasan mengenai pos-pos yang diperiksa,penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dantemuan-temuan pemeriksa. Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Persentase skor tanggapan responden sebesar 91.7% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik

18. Hasil Pemeriksaan

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hasil Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
18	Hasil pemeriksaan	F	1	0	2	25	47	342	375	91.2
		%	1.3	0	2.6	33.3	62.6			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam laporan hasil pemeriksaan tidak harus menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 91.2% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

19. Kesimpulan dan Usulan Pemeriksaan

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kesimpulan dan Usulan Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
19	Kesimpulan dan usul pemeriksaan	F	0	1	2	13	59	355	375	94.6
		%	0	1.3	2.6	17.3	78.6			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujudalam melakukan kesimpulan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas.Artinya sebagian besar

pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 94.6% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

4.3.2 Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan, selanjutnya untuk memperoleh gambaran kesadaran wajib pajak pada KPP Prtama di wilayah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi persentase skor tanggapan responden atas kelima indikator. Berikut hasil rekapitulasi persentase skor tanggapan responden mengenai kesadaran wajib pajak.

Tabel 4.24
Rekapitulasi Skor Tanggapan responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela	156	375	82.4	Kurang
2	Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar	289	375	77	Baik
3	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	323	375	86.1	Sangat Baik
4	Fungsi pajak untuk pembiyaan Negara	335	375	89.3	Sangat Baik
5	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	339	375	90.4	Sangat Baik
Total		**1595**	**1875**	**85.1**	**Sangat Baik**

Sumber: Data Primer yang diolah 2011

Persentase total akumulasi skor tanggapan responden sebesar 85.1% termasuk dalam kategori sangat baik, artinya sebagian kesadaran wajib pajak pada KPP

Pratama di wilayah kota Bandung memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi. Namun menurut pemeriksa pajak masih kurang setuju dengan adanya penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan cara sukarela, terbukti dengan tingkat persentase sebesar 83.4%, yang artinya memiliki kategori kurang baik. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badanakan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner.Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan 5 (lima)indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan.

1. Menghitung, Membayar, Melaporkan Pajak dengan Sukarela

Tabel 4.25
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menghitung, Membayar, Melaporkan Pajak dengan Sukarela

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
1	Menghitung,membayar, melaporkan pajak dengan suka rella	F	27	15	33	0	0	156	375	41.6
		%	36	20	44	0	0			

Sumber: Data primer yang diolah, 201

Paling banyak responden sangat kurang setujudalam menghitung,membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden sebesar 41.6% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori kurang baik.

2. Menghitung, Membayar, Melaporkan Pajak dengan benar

Tabel 4.26
Distribusi Jawaban responden Mengenai Menghitung, Membayar, Melaporkan Pajak dengan Benar

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden 1	2	3	4	5	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
2	Menghitung, membayar melaporkan pajak dengan benar	F	0	3	24	29	19	289	375	77
		%	0	4	32	38.6	25.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden setujudalam menghitung,membayar, melaporkan pajak dengan benar.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 77% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori baik.

3. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan

Tabel 4.27
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden 1	2	3	4	5	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
3	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	F	1	0	5	38	31	323	375	86.1
		%	1.3	0	6.6	50.6	41.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujumengenai adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan

tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 86.1% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

4. Fungsi Pajak untuk Pembiayaan Negara

Tabel 4.28
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pajak untuk Pembiayaan Negara

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
4	Mengetahui fungsi pajak untuk	F	0	0	6	28	41	335	375	89.3
	pembiayaan Negara	%	0	0	8	37.3	54.6			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setuju dengan diadakannya penyuluhan pajak kepada wajib pajak.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 89.3% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

5. Memahami bahwa Kewajiban Perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Tabel 4.29
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memahami Kewajiban Perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	**Butir Kuesioner**		**Skor Jawaban Responden**					**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**Persentase %**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**			
5	Memahami bahwa kewajiban perpajakan	F	0	0	2	32	41	339	375	90.4
	harus dilaksanakan sesuai dengan ketentun yang berlaku	%	0	0	2.6	42.6	54.6			

Paling banyak responden sangat setuju wajib pajakmemahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 90.4% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

4.3.3 Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama di Wilayah Bandung

Berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan, selanjutnya untuk memperoleh gambaran kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Prtama di wilayah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi persentase skor tanggapan responden atas kelima indikator. Berikut hasil rekapitulasi persentase skor tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 4.30
Rekapitulasi Skor Tanggapan responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kategori
1	Kewajiban pajak dalam mendaftarkan diri	185	375	49.3	Kurang
2	Kepatuhan untuk menyetorkan atau mengembalikan lagi SPT	345	375	92	Sangat Baik
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	346	375	92.2	Sangat Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	325	375	86.6	Sangat Baik
Total		1358	1500	90.5	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan data primer, 2011

Persentase total akumulasi skor tanggapan responden sebesar 90.5% termasuk dalam kategori sangat baik, artinya sebagian kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah kota Bandung memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi. Namun bila dilihat dari kewajiban pajak dalam mendaftarkan diri memiliki persentase di bawah 50% yaitu 49.3% yang artinya kurang patuh dalam mendaftarkan diri. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badanakan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 (empat)indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan.Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan.

1. Kewajiban Pajak dalam Mendaftarkan Diri

Tabel 4.31
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kewajiban Pajak dalam Mendaftarkan Diri

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
1	Kewajiban wajib pajak dalam	F	25	20	40	0	0	185	375	49.3
	mendaftarkan diri	%	53.3	13.3	20	0	0			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat kurang setujumengenai kewajiban pajak dalam mendaftarkan diri.Terbukti dari persentase skor tanggapan responden sebesar 49.3% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori kurang.

2. Kepatuhan untuk Menyetorkan atau Menyampaikan kembali SPT

Tabel 4.32
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Untukl Menyetorkan atau Menyampaikan kembali SPT

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
2	Kepatuhan untuk menyetorkan/ menyampaikan kembali SPT	F	0	0	1	28	46	345	375	92
		%	0	0	1.3	37.3	61.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujumengenai kepatuhan untuk menyetorkan atau menyampaikan kembali SPT.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 92% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

3. Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Tabel 4.33
Distribusi Responden Mengenai Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	F	0	0	0	29	46	346	375	92.2
		%	0	0	0	38.6	61.3			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujumengenai kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar

dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 92.2% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

4. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan

Tabel 4.34
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	F	0	0	7	36	32	325	375	86.6
		%	0	0	9.3	48	42.6			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Paling banyak responden sangat setujumengenai kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.Artinya sebagian besar pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Persentase skor tanggapan responden sebesar 86.6% bila merujuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori sangat baik.

4.4 Analisis Verifikatif Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Pada bagian ini akan diuji pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung menggunakan regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi

pada penelitian ini berdasarkan data 75 responden. Karena skor jawaban responden masih berbentuk skala pengukuran ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis regresi linier terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of successive interval*

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakanuntuk menguji pemeriksaan pajak (X_1) dan Kesadaran wajib pajak (X_2) terhadapkepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan PajakPratama diwilayah Kota Bandung. Maka dapatdiestimasi dengan menggunakan *software 17.0 for windows* dengan persamaan regresi menggunakan rumus sebagai berikut. Persamaan regresinya sebagai berikut:

Tabel 4.35
Hasil Analisis Regresi
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-.515	.424		-1.214	.229		
	x1	.336	.139	.207	2.414	.018	.840	1.190
	x2	.659	.089	.637	7.432	.000	.840	1.190

a Dependent Variable: y

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = -0.515 + 0.336\ X_1 + 0.659\ X_2$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

X_1 = Pemeriksaan Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

Nilai koefisien konstanta = -0.515, hal ini menunjukan bahwa apabila nilai pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak pada objek penelitian sama dengan 0, maka besar variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan akan sebesar -0.515.

Harga koefisien regresi Pemeriksaan Pajak= 0.336 berarti bahwa apabila nilai Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan (tanda +) sebesar satu satuan poin sementara variabel independen Kesadaran wajib Pajak bersifat tetap maka besar variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada kasus penelitian tersebut akan meningkat sebesar nilai 0.336*100% = 33.6%

Harga koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak= 0.659 berarti bahwa apabila nilai Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan (tanda +) sebesar satu satuan poin sementara variabel independen Pemeriksaan Pajak bersifat tetap maka besar variabel Y sebesar0.659*100%=65.9% pada kasus penelitian ini akan meningkat sebesar nilai persentase tersebut.

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi

tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Pengujian Hipotesis :

1. H_0: Data berasal dari populasi berdistribisi normal.
2. H_1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Jika nilai asymp.*Sig. (2-tailed) kolmogorov smirnov* >alpha (tingkat ketelitian=5%) maka terima Ho atau data menyebar secara normal.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 17.0 for windows maka hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.36
Test of Normality
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

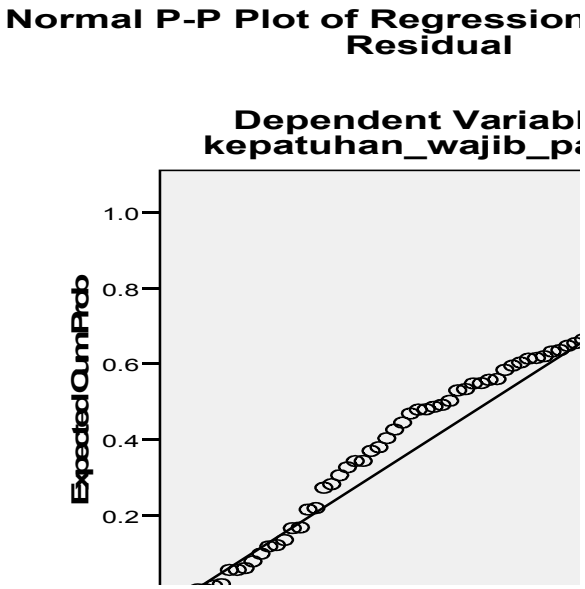
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.74461171
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.072
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.939
Asymp. Sig. (2-tailed)		.341

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Karena nilai asymp.*Sig. (2-tailed) kolmogorov smirnov* untuk *Standardized Residual* sebesar *0.341*> dari 0.05 maka terima Ho artinya data *Standardized* menyebar secara normal.

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1

Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal, artinya sempel data melebihi populasi sebenarnya.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Pengujian Hipotesis :

1. H_0: Tidak terjadi adanya Multikolinear diantara data pengamatan (*independent variable*).
2. H_1: Terjadi adanya Multikolinear diantara data pengamatan (*independent variable*)

Jika nilai *VIF*<10 maka terima Ho atau tidak terdapat hubungan yang linear diantara variabel independen yang ada pada model, sehingga kekhawatiran akibat multikolinearitas dapat dihindari.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 17.0 for windows maka hasil uji multikolinieritas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.37
Test of Multykolinieritas

Model		T B	Sig. Std. Error
1	x1	.840	1.190
	x2	.840	1.190

a Dependent Variable: y

Karena nilai *VIF* untuk Pemeriksaan Pajak bernilai dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 1,190 pada kondisi < 10. Tingkat ketelitian 0,05 maka terima Ho atau tidak terdapat hubungan yang linear diantara variabel independen yang ada pada model, sehingga kekhawatiran akibat multikolinearitas dapat dihindari.Artinya jika terdapat multikolinearitas maka koefisien regresi relative pasti tingkat kesalahannya kecil.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien.Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *Glejser test*, yaitu dengan mengregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).Apabila koefisien regresi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.Pada tabel 4.9 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Pengujian Hipotesis :

1. H_0: Tidak ada hubungan yang simetrik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya (variabel independen diluar variabel independen yang di hitung).
2. H_1: ada hubungan yang simetrik antara variabel yg menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya (variabel independen diluar variabel independen yang di hitung)

Nilai Sig. *Corelations spearman's*> alpha (tingkat ketelitian=5%) maka terima Ho.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 17.0 for windows maka hasil uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.38
Test of Heteroskedastisitas
Correlations

			x1	x2	ax1	ax2
Spearman's rho	x1	Correlation Coefficient	1.000	.456(**)	.053	-.124
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.325	.144
		N	75	75	75	75
	x2	Correlation Coefficient	.456(**)	1.000	.067	-.147
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.285	.105
		N	75	75	75	75
	ax1	Correlation Coefficient	.053	.067	1.000	.311(**)
		Sig. (1-tailed)	.325	.285	.	.003
		N	75	75	75	75
	ax2	Correlation Coefficient	-.124	-.147	.311(**)	1.000
		Sig. (1-tailed)	.144	.105	.003	.
		N	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Karena korelasi pemeriksaan pajak pajak terhadap AX1 bernilai 0.325 > 0.05 dan kesadaran wajib pajak bernilai 0,105 > 0.05 artinya tidak ada hubungan yang simetrik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya (variabel independen diluar variabel independen yang di hitung).

4.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel independent (X_1), pemeriksaan pajak yang diduga memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan sebagai variabel dependent (Y). Korelasi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan dihitung menggunakan korelasi *product moment.*

Untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X_1 dan Y, Variabel X_2 dan Y, X_1 dan X_2dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

   Dengan menggunakan perhitungan secara komputerisasi yaitu menggunakan SPSS 17.0 for windows dapat dijelaskan seperti table dibawah ini:

Tabel 4.39
Koefisien Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Correlations

Control Variables			x1	Y
x2	x1	Correlation	1.000	.274
		Significance (2-tailed)	.	.018
		Df	0	72
	Y	Correlation	.274	1.000
		Significance (2-tailed)	.018	.
		Df	72	0

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Hasil perhitungan SPSS 17.0 for windows menghasilkan nilai korelasi (R) yang sama yaitu 0.274. Korelasi pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dalam kategori rendah.Karena berada pada range 0.25 – 0.5.Nilai r tersebut berarti bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan bersifat positif, maksudnya jika semakin tinggi pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak badan di prediksi akan semakin tinggi pula. Kemudian besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama di wilayah kota Bandung ketika pemeriksaan pajak tidak berubah adalah $(0,274)^2$ x 100 = 7,51%, artinya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Dengan menggunakan perhitungan secara komputerisasi yaitu menggunakan SPSS 17.0 for windows dapat dijelaskan seperti table dibawah ini:

Tabel 4.40
Koefisien Korelasi Parsial Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			x2	Y
x1	x2	Correlation	1.000	.659
		Significance (1-tailed)	.	.000
		Df	0	72
	Y	Correlation	.659	1.000
		Significance (1-tailed)	.000	.
		Df	72	0

Hasil perhitungan SPSS 17.0 for windows menghasilkan nilai korelasi (R) yang sama yaitu 0.659. Korelasi kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dalam kategori kuat. Nilai tersebut berarti bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan bersifat positif, maksudnya jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak badan di prediksi akan semakin tinggi pula. Kemudian besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama di wilayah kota Bandung sebesar (0,659)2 x 100% = 43,43% yang artinya kesadaran wajib pajak tidak berubah.

2. Korelasi secara simultan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak perhitungan tersebut sesuai dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu SPSS 17.0 for windows yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.41
Model Summary Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.745[a]	.555	.542	.44220	.555	44.851	2	72	.000

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan output software SPSS diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.745. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang kuat/tinggi antara kualitas pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan sebesar 55,50% menunjukan bahwa pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 55,50%. Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y) digunakan koefisien determinasi Koefisien determinasi merupakan suatu niali yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.745[a]	.555	.542	.44220	.555	44.851	2	72	.000

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Nilai koefisien pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan bernilai positif 0.745 artinya hubungan tersebut besar dan searah. Nilai koefisien determinasi variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat dari R Square = 0.555 artinya nilai kedua variabel tersebut bekerja simultan mempengaruhi secara positif sebesar 0.555 x 100% = 55.5% terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dari table diatas dapat diketahui bahwa nilai R –square adalah sebesar 0.Nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

Koefisien determinasi sebesar 55.50% menunjukan bahwa perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak.Sedangkan sisanya 44.50% dipengaruhi variable lain di luar variable pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak.Factor-faktor lainnya itu

seperti teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana pemeriksaan.Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai korelasi dalam kategori sedang terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Setelah mendapatkan hasil perhitungan diatas baik perhitungan manual maupun menggunakan SPSS 17.0 for windows, hasilnya adalah pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang sedang dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.Hal tersebut dibuktikan dengan teori.

Menurut Mardiasmo (2009:50), menjelaskan bahwa:

"Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintahan untuk menialai kepatuhan formal maupun materil"

Dapat disimpulkan harapan dari pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak yang semakin baik sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau semakin baik.

4.4.3 PengaruhKoefisien Korelasi Secara Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1660 yang diperoleh dari t tabel pada $\alpha = 0.05$. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.43
Correlations Partial
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-.515	.424		-1.214	.229		
	x1	.336	.139	.207	2.414	.018	.840	1.190
	x2	.659	.089	.637	7.432	.000	.840	1.190

a Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

4.4.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Secara Parsial

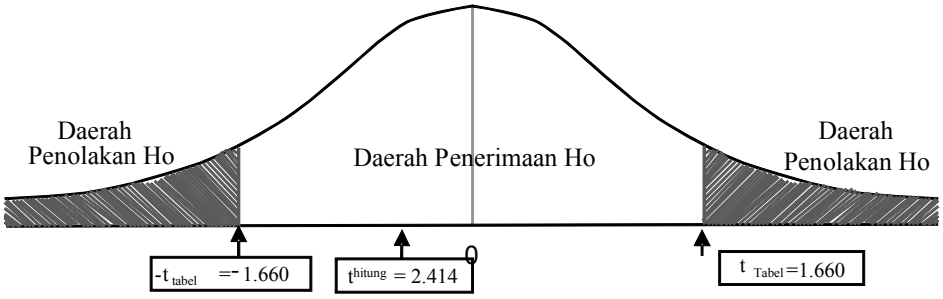
Pengujian Hipotesis:

a. H_0 : Ada pengaruh yang tidak signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di apabila kesadaran wajib pajak dikendalikan (constan)

b. Hi : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadapkepatuhan wajib pajak badan di apabila pemeriksaan pajak dikendalikan (constan).

Nilai signifikansi t sebesar 0.018 < alpha (0.05) atau nilai t hitung sebesar 2.414 > t table sebesar1.660 maka tolak H0 atau terima Hi maka ada pengaruh yang Signifikan antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau 0,018 < 1.660 maka h_0 ditolak dan terima h_1.Hal ini berarti dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.



Gambar 4.2
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji Parsial

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar 2.414 berada pada daerah penerimaan Ho, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Secara Parsial

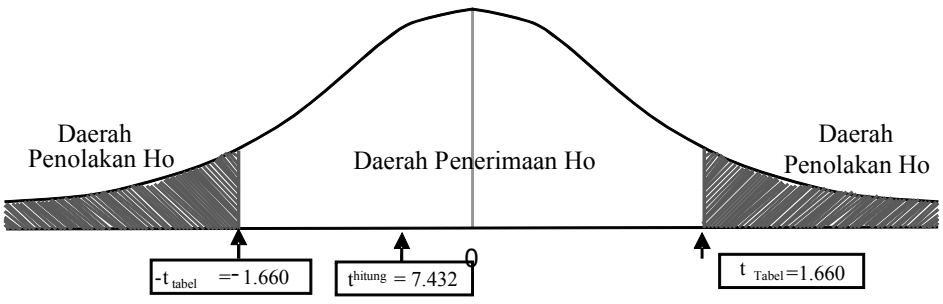
Pengujian Hipotesis:

a. H_0 : Ada pengaruh yang tidak signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan apabila pemeriksaan pajak dikendalikan (constan)

b. H_i : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan apabila pemeriksaan pajak dikendalikan (constan).

Signifikan t sebesar 0.000 < alpha (0.05) atau nilai t hitung sebesar 7.432 > Nilai t table 1.660 maka tolak H_0 atau terima H_i maka ada pengaruh yang signifikan antar variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau 7.432 < 1.660 maka h_0 ditolak dan terima h_1. Hal ini berarti dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak memilik pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.



Gambar 4.3

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji Parsial

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar 7.432 berada pada daerah penerimaan $H_{0,}$ yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Untuk menentukan signifikan (keberatan) pengaruh secara simultan antara dua variabel independen dan variabel dependen dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. H_{0} :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan.
2. H_{i} :Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan.

4.4.4 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari table ANOVA hasil pengolahan SPSS 17.0. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan, F tabel(1-a) ((dk=k), (dk=n-k-1))(1-a)((dk=3), (dk=75-3-1))(1-0.05)(3;71) = 7.722

c. Nilai F_{hitung} dapat di cari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$= \frac{}{(\quad - \qquad (\quad - \quad - \quad)}$$

Dimana:

R = koefisien kolerasi ganda

K = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Dengan bantuan software *SPSS.17.0*, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.44
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.540	2	8.770	44.851	.000(a)
	Residual	14.079	72	.196		
	Total	31.619	74			

a Predictors: (Constant), x2, x1
b Dependent Variable: y

Nilai Sig. F 0.000< alpha (tingkat ketelitian = 5%) atau nilai F hitung sebesar 44.851> 8.54 maka terima Ho atau secara bersama-sama kedua variabel independen (pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak) ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis denga membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

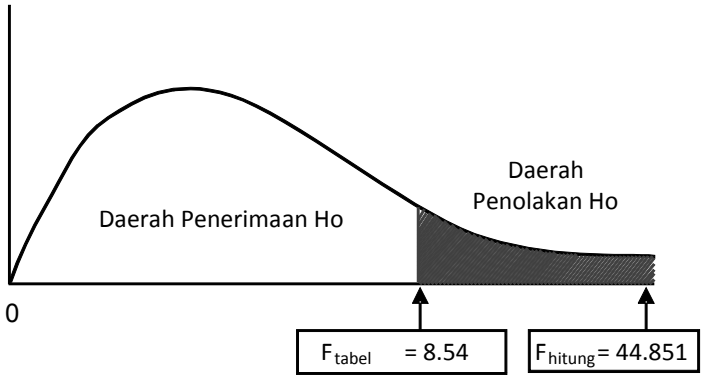
Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (44.851>8.54), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah

Kota Bandung. Selain itu penelitian juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada table.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

e. Pengambilan keputusan hipotesis



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 44.848 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.